

PENGARUH KESADARAN MASYARAKAT, KUALITAS PELAYANAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI WILAYAH JAKARTA BARAT

Angela Harianja^{*1}, Jakaria²

^{1,2} Prodi Sarjana Terapan (D-IV) Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jakarta
e-mail: ^{*1}angelaharianja84@gmail.com , ²jakaria.fe@trisakti.ac.id

Received: 27 Desember 2022

Revised: 24 April 2023

Accepted: 30 April 2023

Abstrak

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh kesadaran masyarakat, kualitas pelayanan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat di wilayah Jakarta Barat. Hasil analisis dengan menggunakan metode SEM (Structural Equation Model) diperoleh hasil bahwa kesadaran masyarakat, kualitas pelayanan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat di wilayah Jakarta Barat.

Kata kunci: Kesadaran Masyarakat, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This study aims to analyze the influence of public awareness, service quality and tax rates on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes at Samsat offices in West Jakarta. The results of the analysis using the SEM (Structural Equation Model) method show that public awareness, service quality and tax rates have an effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax at the Samsat office in the West Jakarta area.

Keywords: Public Awareness, Service Quality, Tax Rates, Taxpayer Compliance in Paying

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengumpulan pemasukan pajak berfungsi sebagai platform guna membangun pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan wacana publik. Hal ini dilakukan bersamaan dengan kekuasaan dimiliki pemerintah guna mengumpulkan pembayaran tersebut. Pajak ialah sumber utama uang bagi negara, dan peran dimainkannya dalam kehidupan penduduk sangat penting dan bermanfaat, khususnya dalam kaitannya dengan anggaran pemasukan dan pengeluaran negara. Dalam upaya guna mencapai tujuan memaksimalkan pemasukan negara, sangat penting guna mempertimbangkan kemauan dan kemampuan pembayar pajak guna melunasi pajak. Sejauh mana wajib pajak bersedia guna menyelesaikan komitmen pajak berpotensi berdampak pada jumlah pemasukan dikumpulkan oleh negara atau kota. Jumlah keseluruhan uang pajak diterima oleh negara akan meningkat pada level sama dengan peningkatan pemasukan pajak suatu daerah, jika pemasukan pajak daerah tersebut meningkat. Khususnya di Indonesia, pajak memegang peranan penting dalam hal penerimaan negara, salah satunya ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepemilikan atau penguasaan alat transportasi bermotor bisa dibebankan pajak, seperti dinyatakan dalam ayat 12 dan 13 Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009, menyatakan pajak bisa dibebankan atas alat tersebut. Kantor Samsat bertanggung jawab atas pemungutan pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor. Dinas Pemasukan Provinsi bekerja guna meningkatkan akurasi proses pengumpulan BBNKB. Pajak rokok (disingkat BBNKB), pajak bahan

bakar kendaraan bermotor (disingkat BBKB), dan pajak air permukaan (disingkat PAP) mencerminkan pungutan dikelola di level provinsi.

Menurut Rama dan Jamal (2013), dikutip oleh Suharyadi dkk. (2019), sektor pajak kendaraan bermotor mencerminkan sumber utama pemasukan asli daerah, dan sangat penting bagi pemerintah daerah guna terus menata dan secara aktif mencari sumber-sumber pendanaan daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta pajak dibebankan pada kendaraan bermotor mencerminkan satu-satunya jenis pemasukan bisa dikaitkan secara langsung dengan jumlah kegiatan ekonomi terkonsentrasi di suatu daerah. Akibatnya, situasi ini muncul. Kepatuhan wajib pajak ialah proses di mana wajib pajak memenuhi komitmen perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sejalan dengan peraturan perpajakan, seperti didefinisikan oleh Ilhamsyah dkk. (2016). Wajib pajak mematuhi hukum dan bisa mengambil keuntungan dari manfaat dimungkinkan oleh struktur pajak rumit di negara tersebut. Keputusan guna melunasi pajak atau tidak berasal dari dalam diri individu. Ketika pembayar pajak memahami relevansi uang pajak dengan pertumbuhan dan peningkatan komunitas, lebih mungkin guna mematuhi komitmen hukum guna melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Hal ini dikarenakan para pembayar pajak ingin melihat kota berkembang. Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat mencerminkan lembaga paling penting, penyedia layanan, dan sumber data bagi masyarakat tinggal di Jakarta Barat serta pemerintah melayani (BPS). Jumlah penduduk Kota Administratif Jakarta Barat ialah 2,5 juta jiwa, dengan 1,3 juta penduduk laki-laki dan 1,2 juta penduduk perempuan. Terdapat 1,3 juta penduduk laki-laki di kota ini. Lokasi ini mencerminkan salah satu terpadat di planet ini, dengan kepadatan penduduk 19.191,67 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya salah satu terpadat di dunia. (<https://jakarta.bps.go.id/>).

Menurut disampaikan oleh AA Bintary pada tahun 2020 dan didasarkan pada wawancara pertama dengan informan dari BPRD bisa memberikan penjelasan guna fenomena ini. Menurut BPRD DKI Jakarta, masih ada ribuan kendaraan transportasi di Jakarta memiliki tunggakan denda PKB. Karena menawarkan berbagai macam layanan, Samsat bisa membantu anggota masyarakat umum dalam berbagai macam tugas, termasuk memperoleh akses informasi, melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan melakukan sejumlah kegiatan lainnya. Berlandaskan data disebutkan di atas, DKI Jakarta memiliki tunggakan pembayaran PKB disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap persyaratan pembayaran PKB. Hal ini mengakibatkan jumlah tunggakan PKB cukup besar. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan jumlah total pajak daerah terkumpul, para ahli akan melakukan investigasi terhadap level kepatuhan Samsat Jakarta Barat. Kemudian, perkembangan zaman semakin pesat memotivasi masyarakat dari berbagai lapisan sosial guna terus memenuhi keinginannya agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Penyediaan sarana mobilitas, seperti kendaraan bermotor, tidak lagi dipandang sebagai suatu kemewahan oleh masyarakat, melainkan dipandang sebagai suatu kebutuhan guna menjalankan aktivitas sehari-hari diperlukan. Akibatnya, terjadi penyesuaian terhadap keseluruhan upaya dilakukan oleh masyarakat guna mengantongi kendaraan bermotor. Internal Revenue Service mengakui pembayaran sukarela sebagai kepatuhan pajak penuh :

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Bersumber Pada Tipe Kendaraan
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2020

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta		
	2019	2020	2021
Mobil Penumpang	3.310.426 T	3.365.467 T	4.111.231 T
Bus	34.905 T	35.266 T	342.667 T
Truk	669.724 T	679.708 T	785.600 T
Sepeda Motor	15.868.191 T	16.141.380 T	16.519.197 T
Jumlah	19.883.246 T	20.221.821 T	21.758.695 T

Sumber : <https://jakarta.bps.go.id/>

Jumlah 6.183.376 kendaraan bermotor dengan tunggakan pajak sebesar 30,6% ditampilkan pada Tabel 1 Pada pertengahan tahun 2020, DKI Jakarta akan mengumpulkan jumlah kendaraan bermotor dengan tunggakan pajak hampir menembus angka 6 juta unit. Menurut Klaim Herlina Ayu, Humas Badan Pemasukan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, hingga Juni 2020, sebanyak 6.183.376 unit kendaraan bermotor dari semua golongan belum melakukan daftar ulang meskipun batas waktu ditentukan telah lewat. (Bapenda). Terbisa 6.183.376 unit kendaraan bermotor dari semua golongan harus melakukan registrasi ulang hingga saat ini. Terdapat 6.183.376 unit kendaraan bermotor dari semua golongan saat ini tidak terdaftar karena belum melakukan registrasi ulang.

Penegakan hukum pajak berujung pada peningkatan pemasukan negara. Jika tidak ada pajak, maka tidak akan ada pemerintah. Dari sudut pandang politik, level kepatuhan wajib pajak lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak penerimaan pajak. Rakyat negeri ini perlu memahami secara hukum diwajibkan guna mematuhi UUD 1945 setiap saat. UUD 1945 ialah dokumen menjadi dasar hukum bagi bangsa kita (Suardika, 2007:74). PKB di Jakarta Barat mencapai Rp 1,2 triliun, jauh lebih besar dari target Rp 1,5 triliun dan dengan mudah melampauinya (jakarta.go.id).

Tabel 2. Penerimaan PKB Tahun 2019 – 2020

No	Bulan	Samsat Jakarta Barat
1	Januari	Rp. 885,903,175,629
2	Februari	Rp. 1,529,281,035,110
3	Maret	Rp. 2,249,422,758,964
4	April	Rp. 2,874,360,633,117
5	Mei	Rp. 3,716,337,233,555
6	Juni	Rp. 4,265,964,612,208
7	Juli	Rp. 5,069,140,921,308
8	Agustus	Rp. 5,806,424,637,191
9	September	Rp. 6,603,381,459,664
10	Oktober	Rp. 7,407,740,654,717
11	November	Rp. 8,159,876,184,026
12	Desember	Rp. 8,991,186,688,771
	Grand Total	Rp. 57,559,019,994,260

Sumber : Bapenda

Berlandaskan Tabel 2, pemasukan dikumpulkan dari pajak kendaraan bermotor di Jakarta Barat mengalami penurunan pada tahun 2019. Faisal Syafruddin, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, menemukan 4.151 mobil di Jakarta Barat

memiliki tunggakan pajak sebesar Rp2.000.000.000.000 saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di PT Sari Kebon Jeruk Permai di Meruya Selatan. Lokasi kendaraan-kendaraan tersebut berada di wilayah Meruya Selatan. Data ini telah dikonfirmasi oleh pihak PT Sari Kebon Jeruk Permai. Selain itu, hal ini juga menegaskan masyarakat tidak peduli, tidak tertarik, atau terlalu sibuk guna melunasi pajak. Jumlah kilometer ditempuh oleh orang dan barang akan terus meningkat setiap tahunnya, akan mengarah pada peningkatan produksi mobil-mobil besar guna diaplikasikan dalam lingkungan komersial. Salah satu alasan di balik hal ini ialah karena jumlah orang hidup di dunia terus meningkat, mendorong permintaan mobil. Menurut data diberikan oleh Biro Pusat Statistik, ada lebih dari seribu mobil diproduksi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan masyarakat menginginkan atau membutuhkan akses ke berbagai moda transportasi, bisa dilihat sebagai bukti dari fakta ini. Orang-orang juga terdorong guna membeli kendaraan bermotor pada akhir tahun karena ini ialah waktu di mana harga-harga kendaraan bermotor sering turun secara signifikan. Sebagai hasil dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor sangat mungkin terjadi, Samsat Jakarta Barat mampu mengumpulkan jumlah uang lebih besar dalam bentuk PKB. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 3 menunjukkan angka penerimaan PKB berhasil dikumpulkan oleh Samsat Jakarta Barat.

Tabel 3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 2016 – 2020

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
1	2016	Rp. 1.292.675.554
2	2017	Rp. 1.588.403.654
3	2018	Rp. 1.735.561.039
4	2019	Rp. 1.700.837.445
5	2020	Rp. 1.670.181.690

Sumber : *Samsat Jakarta Barat*

Berlandaskan data disajikan pada Tabel 3, jumlah penerimaan terkumpul dari Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Jakarta Barat pada tahun 2019 lebih rendah pada tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah penerimaan terkumpul pada tahun 2016 dan 2020 jika digabungkan. Hal ini menunjukkan masih ada cukup banyak masyarakat belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hingga batas waktu ditentukan. Diperkirakan pemerintah kota Jakarta Barat akan menerima peningkatan pemasukan pajak sebagai akibat dari meningkatnya jumlah mobil di daerah tersebut. Data disajikan pada Tabel 1.3 menunjukkan pemasukan ini mengalami penurunan pada tahun 2019. Fakta pemilik puluhan ribu mobil di Jakarta Barat belum melunasi pajak kendaraan selama beberapa tahun ialah fakta sudah diketahui umum. Jumlah total uang mungkin terutang bisa mencapai miliaran rupiah.

Dalam rangka mensosialisasikan kepatuhan wajib pajak dan menurunkan angka keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika wajib pajak kendaraan bermotor melunasi pajak tepat waktu, pada tanggal jatuh tempo, dan secara tepat melengkapi dokumen diperlukan guna menghindari denda, dianggap patuh terhadap hukum. Pembayar pajak tidak patuh berisiko tertinggal lebih jauh dalam pembayaran pajak. Kowel et al. menawarkan berbagai macam ukuran kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak melunasi pajak tepat waktu, melengkapi berkas-berkas komitmen pembayaran, mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran pajak, dan tidak pernah melanggar peraturan ialah contoh dari tanda-tanda tersebut.

Dalam hal pajak alat transportasi bermotor, wajib pajak dianggap patuh terhadap hukum jika telah memenuhi komitmen pembayarannya, meliputi KTP, STNK dan BPKB, sadar akan batas waktu pembayaran, dan tidak pernah melewati batas waktu telah ditentukan. Penentuan patuh atau tidaknya seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan didasarkan pada sadar atau tidaknya wajib pajak terhadap batas waktu dan pernah atau tidaknya wajib pajak melanggar ketentuan berlaku. Jika keenam hal tersebut terpenuhi, maka diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah masyarakat melunasi pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman wajib pajak, berat ringannya sanksi pajak, level sosialisasi pajak kendaraan bermotor, dan kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, mengedukasi wajib pajak mencerminkan hal sangat penting.

Tabel 4. Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setiap Kota DKI Jakarta Tahun 2020

No	Unit Samsat	Jumlah	Persentase(%)
1	Samsat Jakarta Barat	1.670.181.690.077	21,20%
2	Samsat Jakarta Pusat	1.272.159.066.951	16,15%
3	Samsat Jakarta Selatan	2.061.913.756.535	26,17%
4	Samsat Jakarta Timur	1.684.659.845.742	21,38%
5	Samsat Jakarta Utara	1.190.309.125.163	15,11%
	Total	7.879.223.484.468	100%

Sumber : *Samsat Jakarta*

Samsat Jakarta Barat menghasilkan pemasukan pajak kendaraan bermotor tertinggi ketiga pada tahun 2020, yaitu sebesar 21,20%. Kepatuhan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), masih rendah. Jakarta Barat memiliki pemasukan pajak kendaraan bermotor jauh lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Jakarta. Pemasukan dari pajak kendaraan bermotor bervariasi di seluruh wilayah Jakarta.

Guna menegakkan batas atas pajak, sanksi harus diaplikasikan. Jika percaya dampak dari tidak melunasi pajak akan sangat berat, sebagian besar wajib pajak akan melunasi pajak. Melunasi pajak selama lima tahun sekaligus atau tidak melunasi pajak sama sekali tidak sebanding dengan sanksi pajak berat, menurut banyak orang. Oleh karena itu, sanksi pajak mencerminkan variabel independen relevan dalam penelitian kami. Peningkatan layanan otoritas pajak seharusnya menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Otoritas pajak menyediakan layanan, bantuan, dan arahan. juga bisa menerapkan implikasi pajak dan menjelaskan perubahan peraturan pajak. Jika petugas SAMSAT Jakarta Utara bersikap ramah, jujur, dan transparan, maka kepatuhan wajib pajak dan pemasukan akan meningkat.

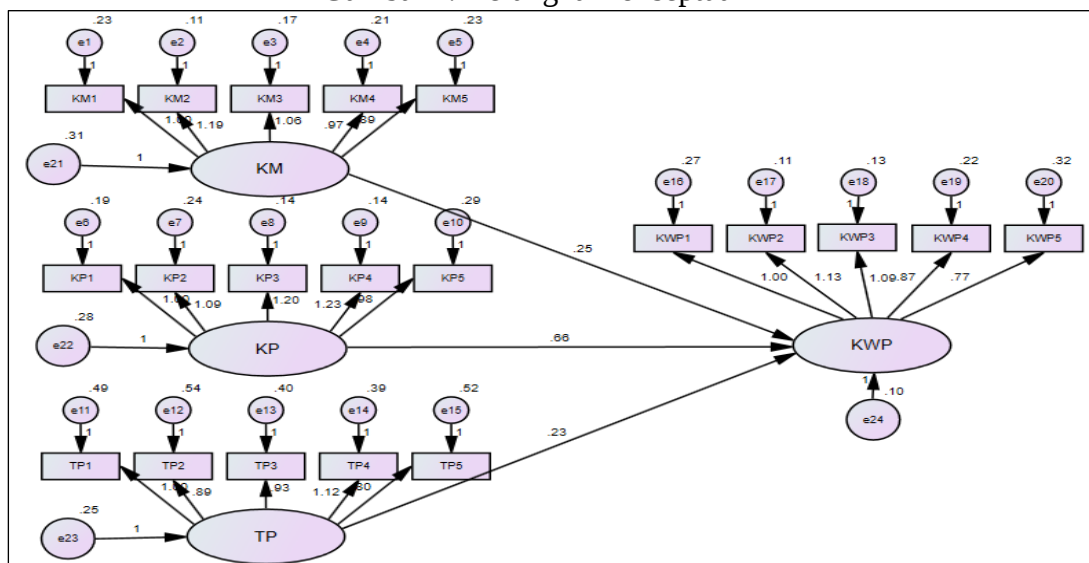
Jika wajib pajak menyadari melunasi pajak ialah tanda dedikasi dan hubungan dengan negara dan daerah, akan melunasi pajak dengan cepat dan tanpa ragu-ragu. Jika wajib pajak menyadari melunasi pajak ialah suatu komitmen dan memahami arti penting pajak bagi negara dan daerah, maka akan semakin banyak wajib pajak menyadari membayar PKB juga menunjukkan komitmen kepada negara dan keterlibatan dalam pertumbuhannya. Dengan adanya informasi ini, individu akan bisa menghindari keterlambatan pembayaran pajak, melakukan pengaturan keuangan guna pembayaran pajak kendaraan bermotor dan membayar PKB secara sukarela dan tanpa tekanan. Guna memenuhi komitmen perpajakannya, wajib pajak harus memiliki pemahaman komprehensif terhadap peraturan tersebut. Hal ini terlihat dari kesungguhan dan

keinginan wajib pajak guna mematuhi. Wajib pajak memahami peraturan perpajakan akan lebih siap dalam memenuhi komitmen perpajakannya (Resmi, 2012:49). Pengetahuan masyarakat, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Wardani (2018), pajak merupakan salah satu sumber uang negara diaplikasikan guna pertumbuhan, kesejahteraan rakyat, dan kenyamanan rakyat. Menurut pernyataan dibuat dalam sebuah artikel dimuat dalam jurnal Wardani & Rumiya (Ilhamsyah et al., 2016), (2017) Kepatuhan Wajib Pajak ialah pelaksanaan komitmen perpajakan WP secara tepat dan akurat sejalan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Kesadaran masyarakat mengacu pada perilaku konsumen berbentuk opini atau kesan dan dibentuk berlandaskan informasi, logika, dan keyakinan. Secara alternatif, kesadaran masyarakat bisa digambarkan sebagai keinginan guna berperilaku sejalan dengan rangsangan dimungkinkan oleh sistem dan peraturan perpajakan berlaku. Ketika seseorang sadar guna melunasi pajak, hal ini menunjukkan sadar akan masalah dan langkah-langkah perlu diambil guna memperbaikinya (Indrawan, 2014).

Definisi ini berlaku guna pelayanan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak. (Rahayu, 2020); (Rukmana, 2013); (Barus, 2016); Kotler, 2016). (Nurlaela, 2017). Kualitas Pelayanan didefinisikan sebagai pelayanan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak dalam upaya memenuhi persyaratan administrasi perpajakan dengan mengikuti standar pelayanan mengedepankan kepuasan wajib pajak. Definisi tarif pajak menurut Setiawati (2019) tarif pajak adalah pemahaman yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana wajib pajak berupaya menafsirkan data bisa bermacam pangkal mengenai ganjaran perpajakan. Semua alat berat yang beroperasi dengan menggunakan roda dan mesin yang tidak dipasang secara permanen termasuk dalam klaim alat angkutan bermotor (Samudra, 2015) karena digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang mengubah suatu sumber daya alam menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Keterangan:

KM :

Kesadaran
Masyarakat
KP: Kualitas
Pelayanan
TP :
Tarif Pajak
KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

HIPOTESIS

H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3: Terdapat pengaruh positif dan signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan data primer. Metode kuantitatif ini untuk menganalisa korelasi kasusal pada variabel independen pada dependen. Variabel yang akan diteliti berupa Kesadaran Masyarakat, Kualitas Pelayanan dan Tarif Pajak sedangkan variabel dependen pada penelitian ini merupakan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB pada Kantor Samsat di wilayah Jakarta Barat.

Indikator pada masing masing variable dari penelitian ini adalah:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Indikator :

KWP 1: mengetahui ketentuan PKB, (Hermawan, 2021).

KWP 2: memahami prosedur membayar pajak, (Hermawan, 2021).

KWP 3: memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan, (Hermawan, 2021).

KWP 4: menambah beban adanya denda yang harus dibayarkan, (Hermawan, 2021).

KWP 5: mempermudah untuk membayar pajak tepat waktu , (Hermawan, 2021).

KM = Kesadaran Masyarakat

Dengan Indikator :

KM 1: mengetahui membayar PKB bentuk partisipasi pembangunan daerah, (Wardani & Rumiyatun, 2017).

KM 2: membayar & melaporkan PKB dengan sukarela, (Wardani & Rumiyatun, 2017).

KM 3: mengetahui membayar pajak bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, (Wardani & Rumiyatun, 2017).

KM 4: menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak, (Wardani & Rumiyatun, 2017).

KM 5: membayar pajak kesadaran diri sendiri, (Wardani & Rumiyatun, 2017).

KP = Kualitas Pelayanan

Dengan Indikator :

KP 1: memberikan informasi dan sosialisasi, (Dharma & Suardana (2014) dalam Barus, 2016).

KP 2: nyaman dengan fasilitas pada kantor samsat, (Dharma & Suardana (2014) dalam Barus, 2016).

KP 3: memperoleh penyuluhan dan bimbingan, (Dharma & Suardana (2014) dalam Barus, 2016).

KP 4: melayani dengan baik, (Dharma & Suardana (2014) dalam Barus, 2016).

KP 5: berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan kantor samsat, (Dharma & Suardana (2014) dalam Barus, 2016).

TP = Tarif Pajak

Dengan Indikator :

TP 1: menentukan besarnya kesadaran membayar pajak, (Setiawati, 2019).

TP 2: meningkatkan kemauan membayar pajak, (Setiawati, 2019).

TP 3: terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak, (Setiawati, 2019).

TP 4: membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan, (Setiawati, 2019).

TP 5: penerima penghasilan tinggi wajar apabila membayar PKB lebih besar, (Setiawati, 2019).

Dalam upaya memperoleh data, peneliti memakai cara Metode Survey untuk pengumpulan data dengan melakukan Survey kuesioner yang akan disebar oleh penulis kepada WP selaku responden dengan Google Form. Angket ialah metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pemberian sekumpulan daftar pertanyaan maupun pernyataan tertulis agar mendapatkan keterangan dari berbagai responden. Sebelum disebar kuesioner tersebut, pastikan dapat dipahami dan dimengerti oleh responden. Jenis Data yang digunakan studi ini berupa data kuantitatif yang didapat dari hasil angket yang diisi oleh responden. Sedangkan Sumber Data adalah tempat dimana untuk diperoleh data yang diinginkan. Mengetahui Sumber Data dalam studi ini penting sekali supaya tidak menimbulkan kesalahan didalam pemilihan Sumber Data yang sesuai dengan tujuan dilakukannya pengkajian. Untuk Sumber Data penelitian ini, penulis memilih Sumber Data Primer. Didalam studi ini data primer yang didapat oleh penulis dengan menyebarkan angket kepada responden yang nantinya akan diisi oleh responden tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 5. Uji Validitas Variabel

Indikator	Component Matrix	Validitas
KM1	0,792	Valid
KM2	0,878	Valid
KM3	0,884	Valid
KM4	0,854	Valid
KM5	0,791	Valid
KP1	0,837	Valid
KP2	0,832	Valid
KP3	0,875	Valid

KP4	0,878	Valid
KP5	0,792	Valid
TP1	0,659	Valid
TP2	0,654	Valid
TP3	0,739	Valid
TP4	0,722	Valid
TP5	0,658	Valid
KWP1	0,759	Valid
KWP2	0,879	Valid
KWP3	0,886	Valid
KWP4	0,836	Valid
KWP5	0,752	Valid

Sumber: *Data diolah dengan SPSS*

Pada tabel diatas terlihat bahwa seluruh indikator memiliki *Component Matrix* yang nilainya diatas 0,05 sehingga dapat dinyatakan seluruh variabel datanya valid.

UJI RELIABILITAS

Tabel 6. Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliabilitas
KM	0,896	Reliabel
KP	0,898	Reliabel
TP	0,718	Reliabel
KWP	0,879	Reliabel

Sumber: *Data diolah dengan SPSS*

Pada tabel diatas terlihat bahwa seluruh variabel memiliki *Cronbach's Alpha* yang nilainya diatas 0,06 sehingga dapat dinyatakan seluruh variabel datanya reliabel (konsisten).

UJI GOODNESS OF FIT

Tabel 7. Uji Goodness Of Fit

Goodness of Fit Index	Hasil Perhitungan	Criteria (cut-off value)	Kesimpulan
X ² (Chi-Square)	149,684	(Diharapkan Kecil)	Good Fit
Significance probability	0,083	≥ 0,05	Good Fit
RMSEA	0,028	≤ 0,10	Good Fit
NFI	0,946	≥ 0,90	Good Fit
RFI	0,920	≥ 0,90	Good Fit
TLI	0,987	≥ 0,90	Good Fit
CFI	0,991	≥ 0,90	Good Fit

Sumber : *Data diolah dengan AMOS*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil Chi-Square nya 149,684 dan

dapat disimpulkan good fit, untuk signifikansi probabilitas hasilnya 0,083 dan diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan good fit, pada RMSEA hasil nya 0,028 dan dibawah 0,1 sehingga dapat disimpulkan good fit, dan untuk NFI, RFI, TLI, dan CFI masing-masing hasil nya diatas 0,90 sehingga dapat disimpulkan good fit. Berdasarkan hasil dari masing-masing index, maka hasil keseluruhan nya adalah good fit, dan dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

UJI HIPOTESA

Tabel 8. Uji Hipotesa

			Estimate	S.E.	C.R	P
KWP	←	KM	,249	,056	4,457	0,000
KWP	←	KP	,664	,077	8,609	0,000
KWP	←	TP	,235	,077	3,039	0,002

Sumber : *Data diolah dengan AMOS*

H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat bahwa estimasi Kesadaran Masyarakat hasil nya sesuai dengan teori, nilai estimasi sebesar 0,249 dimana artinya jika Kesadaran Masyarakat naik maka Kepatuhan Wajib Pajak tidak ikut naik. Untuk nilai P-Value juga terlihat bahwa nilai nya 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan.

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat bahwa estimasi Kualitas Pelayanan hasil nya sesuai dengan teori, nilai estimasi sebesar 0,664 dimana artinya jika Kualitas Pelayanan naik maka Kepatuhan Wajib Pajak tidak ikut naik. Untuk nilai P-Value juga terlihat bahwa nilai nya 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan.

H3: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat bahwa estimasi Tarif Pajak hasil nya sesuai dengan teori, nilai estimasi sebesar 0,235 dimana artinya jika Tarif Pajak naik maka Kepatuhan Wajib Pajak tidak ikut naik. Untuk nilai P-Value juga terlihat bahwa nilai nya 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dilakukan untuk menganalisa Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Kualitas Pelayanan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat di Wilayah Jakarta Barat maka bisa disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat di Wilayah Jakarta Barat.
2. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat di Wilayah Jakarta Barat.
3. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat di Wilayah Jakarta Barat.

SARAN

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh, penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu :

1. Kuesioner dalam penelitian ini hanya disebarikan kepada 230 responden, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengambil sampel lebih banyak guna mengetahui pengaruh variabel terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Penelitian ini hanya mencakup 3 variabel saja, disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lainnya yang relevan untuk memperkaya perspektif analisa sehingga belum mewakili semua faktor yang memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, P. (2015). Implementasi Pelayanan Samsat Corner dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2(3), 330–355.
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516-522.
- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 12-33.
- Chairunnisa, F. (2019). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Menteng Dalam.

- Dharma, G. P. E. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB Dan BBNKB. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(2), 340-353.
- Ruma, Z., & Jamal, A. D. (2013). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. *Economix*, 1(1).
- Rukmana, D. A. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kinerja Lembaga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Tanjungpinang. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mfaritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*.
- Mustafa, A. F., & Kertahadi & Maulinarhadi, M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dn Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, teknologi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak badan mengenai penggelapan pajak.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.